

ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI SOLUSI SENGKETA BISNIS DI INDONESIA

Edi Riyanto

Fakultas Ekonomi Universitas Dehasen, Bengkulu
Jl. Meranti Raya No.32, Sawah Lebar, Ratu Agung, Bengkulu, 38222
Email: edi.riyanto@gmail.com

Abstract: *Syariah Arbitration as the Solution to Solve the Dispute of Business in Indonesia.* This article discusses the position of the Board of Arbitration Muamalat Indonesia (BAMUI) in Indonesian positive law and political laws of Indonesia. When a business is experiencing a dispute while the company has no strong legitimacy, it is possible that the dispute can not be resolved. The existence of Muamalat Indonesia Arbitration Board has a legal basis and enables other institutions outside the judiciary to be a referee / judge in the settlement of disputes by the parties, it can be seen from the provisions of law No. 14 1970 article 3, paragraph 1 of Law No. 20 in 1999. This arbitration regulation is a solution step in the economy world to reduce the accumulated burden of the dispute submitted to the court. The political side of Islamic law which is reflected in Act No. 30 of 1999 on Arbitration is an alternative dispute resolution instrument so that it ease the burden on the courts. The arbitration itself is a solution that also ever happened in the time of Caliph 'Ali bin Abi Talib. So it can be said that the enactment of this arbitration regulation is a step forward to reduce the accumulated burden of the dispute submitted to the court.

Keywords: Sharia arbitration, dispute

Abstrak: *Arbitrase Syariah Sebagai Solusi Sengketa Bisnis di Indonesia.* Artikel ini membahas mengenai kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam hukum positif Indonesia dan politik hukum Indonesia. Ketika suatu bisnis mengalami sengketa sedangkan perusahaan tidak memiliki legitimasi yang kuat secara yuridis formal, maka bisa jadi sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan. Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ini memiliki dasar hukum yang berlaku saat ini dan memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak, hal ini dapat dilihat dari ketentuan undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 dan Undang-undang No. 20 tahun 1999. Regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah solutif dalam dunia ekonomi untuk mengurangi menumpuknya beban sengketa yang diajukan kepada pengadilan. Sisi politik hukum Islam yang terefleksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase adalah adanya alternatif instrumen penyelesaian sengketa sehingga hal ini meringankan beban dari pengadilan. Adapun arbitrase sendiri adalah sebuah solusi yang sudah pernah terjadi pada zaman khalifah 'Ali bin Abi Thalib ra. sehingga dapat dikatakan bahwa diundangkannya regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah maju untuk mengurangi menumpuknya beban sengketa yang diajukan kepada pengadilan sekaligus menghidupkan atsar sahabat yang menjadi suatu bentuk perwujudan dari sisi-sisi solutif dari agama Islam.

Kata kunci: Arbitrase Syariah, sengketa

Pendahuluan

Perkembangan dunia bisnis dan perekonomian Islam, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional dengan menggunakan perbankan Islam menyebabkan kebutuhan akan lembaga yang bernuansa Islam pula. Salah satunya adalah Lembaga Arbitrase Islam, yang berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam sengketa bisnis.

Perkembangan ekonomi Islam menyebabkan kebutuhan akan penggunaan jasa perbankan Islam dimulai sejak adanya deregulasi perbankan pada Oktober 1988 (PAKTO 1988). Selanjutnya melahirkan Undang-Undang No. 10 tahun 1988 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tentang perbankan. Melalui Undang-undang inilah berdirinya Bank Islam, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 Nopember 1991.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip syariah, bagi hasil dan menegaskan sistem bunga perbankan. Walaupun sebelumnya telah berdiri pula Bank Perkreditan Rakyat (BPR) syariah pertama yang berkedudukan di Bandung tanggal 15 Juli 1991 bernama Bank Perkreditan Rakyat Mardhatillah dan Bank Perkreditan Rakyat Berkah Amal.

Dengan berdirinya Bank dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berdasarkan prinsip syariah itu, di satu pihak telah mengakomodasi kepentingan umat Islam dalam melakukan bisnis dan perekonomian melalui jasa perbankan Islam, tetapi di pihak lain telah menimbulkan masalah yuridis. Masalah ini timbul akibat adanya hubungan hukum dalam bentuk perjanjian antara pihak bank sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debitur atau dengan pihak lain sebagai mitra kerja. Sengketa bisnis para pihak ini sering kali tidak bisa dihindarkan dalam praktek bisnis. Dengan demikian, diperlukan pranata hukum sebagai penyelesaian masalah yang sesuai dengan dasar hukum yang digunakannya.

Tentu saja sengketa bisnis yang berdasarkan hukum Islam di Indonesia tidak bisa diselesaikan melalui Peradilan Umum. Demikian juga ia tidak bisa ditangani oleh Peradilan Agama karena keduanya tidak mempunyai kewenangan dalam menangani perkara tersebut. Di sinilah perlu adanya suatu lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa bisnis yang berdasarkan hukum Islam. Lembaga itu sekarang sudah terbentuk sejak 29 Desember 1992 dengan nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melalui lembaga inilah semua sengketa bisnis, baik yang beragama Islam maupun non Muslim dapat memanfaatkannya. Dalam anggaran dasarnya, sifat lembaga ini terbuka untuk umum tanpa mendasarkan pada salah satu agama. Kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), tentu saja melengkapi perangkat hukum lainnya sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat nasional, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sudah lahir sebelumnya.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian

sengketa di muka pengadilan. Dalam keadaan demikian, posisi para pihak yang bersengketa sangat antagonis (saling berlawanan satu sama lain). Penyelesaian sengketa bisnis model ini tidak direkomendasikan. Kalaupun akhirnya ditempuh, penyelesaian itu semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (ultimatum-remedium) setelah alternatif lain dinilai tidak membuahkan hasil. Proses penyelesaian sengketa yang membutuhkan waktu yang lama mengakibatkan perusahaan atau para pihak yang bersengketa mengalami ketidakpastian. Cara penyelesaian seperti itu tidak diterima dunia bisnis melalui lembaga peradilan tidak selalu menguntungkan secara adil bagi kepentingan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian perkara melalui pengadilan terkadang hanya bersifat formalistik karena para pihak yang bersengketa dipaksakan untuk menerima keputusan pengadilan, walaupun putusan itu sendiri dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Setelah itu, muncul di belakang hari rasa dendam antara para pihak sehingga sering bertindak main hakim sendiri melalui berbagai cara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari penyelesaian perkara melalui pengadilan.

Masalah itulah yang menjadi kekhawatiran masyarakat dan pemikir ekonomi Islam yang perlu mendapat perhatian bersama. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memprakarsai dibentuknya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang diresmikan pada tanggal 21 Oktober 1993 di Jakarta. Menurut H. Hartono Mardjono, bahwa adanya suatu "lembaga permanen" yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perkara perdata di antara bank-bank syariah dengan para nasabahnya, atau khususnya menggunakan jasa mereka, dan umumnya antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariah sebagai dasarnya adalah suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa kehadiran "lembaga permanen" yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara pihak-pihak yang bersangkutan, di samping memang merupakan suatu kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar

yang kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Makalah ini akan membahas mengenai kedudukan pada Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam hukum positif Indonesia dan politik hukum Indonesia, namun sebelumnya akan diurai mengenai arbitrase dalam perspektif Islam juga akan dilihat sekilas mengenai Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI).

Pengertian Arbitrase

Kata arbitrase berasal dari kata “*arbitrare*” (Latin)¹, “*arbitrage*” (Belanda)², “*arbitration*” (Inggris), “*schiedspruch*” (Jerman), dan “*arbitrage*” (Perancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.³

Sedangkan Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How Arbitration Works*, menyatakan bahwa: “Arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka di mana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat”.⁴

Menurut undang-undang, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.⁵ Undang-undang Arbitrase mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum

tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.⁶ Suatu permasalahan yang telah diajukan kepada lembaga arbitrase, memiliki konsekuensi bagi para pihak, yakni mereka tidak dapat lagi diperkarakan di pengadilan negeri.⁷

Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.⁸

Arbitrase Dalam Ajaran Islam

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Selain kata arbitrase Islam yang berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak seperti dikemukakan di atas, di dalam Islam dikenal juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa para pihak yang disebut *al-Shulhu*. Pengertian *al-Shulhu* adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat *al-shulhu* adalah suatu jenis akad—perjanjian, untuk mengakhiri perlawanan—sengketa, antara 2 (dua) orang yang berlawanan (bersengketa). Adapun *tahkim* telah ada sejak masa khalifah ‘Ali bin Abi Thalib.⁹

Dalam istilah Ilmu Fikih, pengertian *tahkim* seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, tahkim diartikan sebagai bersandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka.

¹ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Binacipta, 1992), h. 1.

² M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia – Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Jakarta: PT. Djambatan), h. 1.

³ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013), h. 137.

⁴ M. Husseyn Umar dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, (Jakarta: Komponen Hukum ekonomi ELIPS Project, 1995), h. 2.

⁵ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (1)

⁶ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 2.

⁷ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 3.

⁸ UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 5, ayat (1) dan (2).

⁹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 40.

Sumber Hukum Arbitrase Islam

Sumber hukum Islam adalah:

- a. Alquran;
- b. Sunah;
- c. *Ijma'* Ulama;
- d. *Qiyas*.

Begitu pula kalau kita ingin mengetahui sebab hukum Arbitrase Islam maka akan menunjuk keempat sumber hukum di atas. Sumber hukum Arbitrase Islam antara lain-Qur'an sebagai sumber hukum pertama memberikan petunjuk kepada manusia apabila terjadi sengketa para pihak, apakah di bidang politik, keluarga, ataupun bisnis terdapat dalam Alquran:

وَلِنْ طَائِفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتَنَّاوْا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ
تَفِئَءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Hujurat[49]: 9)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. Al-Nisa'[4]: 35)

Sedangkan dalam sunah Rasulullah saw bisa dilihat dalam hadis dari Abi Hurairah r.a. mengabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Ada seorang laki-laki membeli pekarangan dari seorang. Orang yang membeli tanah pekarangan tersebut menemukan sebuah guci yang berisikan emas. Kata orang yang membeli pekarangan, 'Ambillah emasmu yang ada pada saya, aku hanya membeli daripadamu tanahnya saja dan tidak membeli emasnya'. Jawab orang memiliki tanah, 'Aku telah menjual kepadamu tanah dan barang-barang yang terdapat di dalamnya'. Kedua orang itu lalu bertahkim (mengangkat arbitrator). Kata orang yang diangkat menjadi arbitrator, 'Apakah kamu berdua mempunyai anak'. Jawab dari salah seorang dari kedua yang bersengketa. 'Ya, saya mempunyai seorang anak laki-laki'. Dan yang lain menjawab, 'Saya mempunyai seorang anak perempuan'. Kata arbitrator lebih lanjut, 'Kawinkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu dan biayailah kedua mempelai dengan emas itu, dan kedua orang tersebut menyedekahkan (sisanya kepada fakir miskin).". Menurut *Ijma'* Ulama masalah Arbitrase Islam bisa dilihat dari pendapat Sayyidina Umar bin Khatab, mengatakan bahwa: "Tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai, karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka".(H.R. Bukhari dan Muslim)

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI)

Terdapat beberapa badan arbitrase di Indonesia, yakni: Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI), dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Untuk lebih jauh, penulis akan jelaskan salah satu badan arbitrase yang berasaskan Islam, yakni BAMUI.

- a. Dasar hukum berdirinya BAMUI

Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah sebuah yayasan dengan nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Sebagai yayasan, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) merupakan badan hukum yang mempunyai legitimasi secara yuridis formal, melalui Akta Pendirian Yayasan Nomor: 175 tanggal 21 Oktober 1993, di bawah Notaris Nyonya Lely Roostiati Yudo Paripurno, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-190.H.T.03.07.TH.1992 sebagai pengganti sementara dari Yudo Paripurno, S.H., Notaris di Jakarta.

BAMUI mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 1993,¹⁰ dan keberadaannya sebagai salah satu contoh lembaga arbitrase Islam yang ada di Indonesia, apabila dilihat dari aspek yuridis mempunyai dasar hukum yang sangat kuat, yaitu bersumber dari Alquran, Sunah, dan Ijma' Ulama. Secara historis, dapat dikatakan bahwa keberadaan lembaga arbitrase Islam sudah ada sejak masa Rasulullah saw. dan berkembang sampai sekarang dari lembaga ad hoc menjadi lembaga permanen. Demikian juga secara sosiologis, keberadaan arbitrase Islam merupakan kebutuhan umat dalam menyelesaikan setiap terjadi sengketa di antara mereka yang meliputi masalah politik, peperangan, perdagangan, keluarga, ekonomi, dan bisnis. Selain juga dapat dilakukan secara murah, mudah, dan cepat dibandingkan dengan proses pengadilan.¹¹ Di sinilah sisi politik hukumnya dapat terlihat dengan jelas, yakni efektif-efesien mengurangi peran pengadilan dengan sistem penyelesaian yang islami.

b. Tujuan BAMUI

Sesuai dengan akta pendirian Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), maksud dan tujuan yayasan ini ialah:¹²

- 1) Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain;
- 2) Menerima permintaan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.

c. Yurisdiksi BAMUI

Sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yurisdiksi Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), meliputi:¹³

- 1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI);
- 2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Kesepakatan klausula yang seperti itu bisa dicantumkan dalam perjanjian atau dalam suatu akta tersendiri setelah sengketa timbul.

Kedudukan BAMUI dalam Hukum Positif Indonesia

Banyak arbitrase khusus diperlukan baik secara internasional, regional ataupun yang bersifat nasional. Yang bersifat nasional, arbitrase khusus yang diperlukan antara lain sebagai berikut:

- a. Arbitrase Khusus Muamalat, misalnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkenaan dengan sengketa terhadap bank yang berdasarkan kepada Syariat Islam. Badan Arbitrase ini di Indonesia sudah terbentuk;
- b. Arbitrase khusus di bidang perdagangan (*Commercial Arbitration*);
- c. Arbitrase khusus di bidang ketenagakerjaan (*Collective Bargaining*);
- d. Arbitrase khusus di bidang lingkungan hidup.

Sementara itu, di beberapa negara asing, telah ada beberapa jenis arbitrase khusus, antara lain sebagai berikut:¹⁴

- a. *Commodity Trade Arbitration*;
- b. *Maritime Arbitration*;
- c. *Construction Industry Arbitration*;
- d. *Rent Review & Property Arbitration*;
- e. *Agricultural Property Arbitration*;
- f. *Arbitration Indonesia Consumer Disputes*;
- g. *Small Claims Arbitration in the Country Court District*;
- h. *International Commercial Arbitration*.

¹⁰ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 464.

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, h. 465-466.

¹² Pasal 4 Akta Pendirian BAMUI

¹³ Bab I Yurisdiksi, Pasal 1

¹⁴ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h. 64.

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai Lembaga Arbitrase Islam tidak bisa dilepaskan dengan adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Asuransi Takaful sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah. Perkembangan bank berdasarkan prinsip syariah, secara yuridis formal telah mendapatkan legitimasi yang kuat. Setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Apabila dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank konvensional tidak boleh memiliki *Islamic Window* dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dengan diubahnya undang-undang itu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional di Indonesia diizinkan untuk membuka *Islamic Window* untuk menawarkan di dalam usaha perbankannya di samping dengan sistem konvensional, juga dibolehkan dengan sistem syariah.

Dengan adanya usaha perbankan sistem syariah ini, perkembangan muamalat (Hukum Perdata) umat Islam telah berkembang; dari masalah hukum keluarga, seperti perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat dan perceraian bertambah dengan hukum bisnis, seperti perekonomian, dan dunia usaha lainnya. Apabila di kemudian hari timbul sengketa para pihak, maka yang berkaitan dengan hukum keluarga dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Demikian juga apabila sengketa itu timbul dari masalah bisnis antara Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan nasabahnya, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sesuai dengan klausula yang dibuat para pihak sebelum perjanjian dilakukan (*pactum de compromittendo*).

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) secara yuridis formal mempunyai legitimasi yang sangat kuat di negara Indonesia. Terdapat dasar hukum negara sebagai hukum positif yang berlaku saat ini memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman ada dasarnya diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar dan asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Namun demikian di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain, bahwa: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan".

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan pasal 651 *Reglemen Acara Perdata (Reglement op De Rechtvordering, Staatsblad 1847: 52)* dan Pasal 377 *Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941: 44)* dan Pasal 705 *Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten Staatsblad 1927: 227)*. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Di dalam Mukadimah Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dikemukakan bahwa Badan ini akan bekerja dalam kerangka peraturan resmi negara yang ada dan didasarkan pada kesadaran dan penghayatan hukum pelaku-pelaku muamalat itu, semuanya dilandasi oleh dasar musyawarah mufakat dan akhlak Islam dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Dari segi kelembagaan, status hukum Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) adalah yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 175 pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1993 bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah. Notaris pembuat akta yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) Nyonya Lely Roostati Paripurno, S.H. berdasarkan surat dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Nomor C-190.H.T.03.07.TH.1992 Tanggal 7 Agustus 1992 sebagai pengganti sementara dari Yudo Paripurno, S.H. Notaris di Jakarta.

Dari segi tata hukum Indonesia, keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai Lembaga Arbitrase Islam mempunyai legitimasi yang sangat kuat karena Hukum Positif yang berlaku saat ini memungkinkan suatu lembaga lain di luar lembaga peradilan umum dapat menjadi wasit/ hakim dalam penyelesaian sengketa para pihak. Walaupun, penyelenggara kekuasaan kehakiman ada dasarnya diserahkan kepada badan peradilan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehakiman. Hal tersebut merupakan induk dan kerangka umum yang meletakkan dasar asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri.

Namun demikian, di dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 disebutkan antara lain, bahwa: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui Arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan Arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*executoir*) dari pengadilan".

Selama ini yang dipakai sebagai dasar pemeriksaan Arbitrase di Indonesia adalah Pasal 615 sampai dengan pasal 651 Reglemen Acara Perdata (*Reglement op De Rechtvordering, Staatsblad* 1847: 52) dan Pasal 377 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad* 1941: 44) dan Pasal 705 Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927: 227). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, melalui Pasal 81 undang-undang tersebut terhitung sejak tanggal diundangkannya. Maka berarti segala ketentuan yang berhubungan dengan Arbitrase, termasuk putusan Arbitrase asing tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun secara *lex specialis* ketentuan

yang berhubungan dengan (pelaksanaan) Arbitrase asing telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 yang merupakan pengesahan atas persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan Antar-Negara dan Warga Negara Asing mengenai penanaman modal (*International Centre for the Settlement of Investment Disputes/ ICSID Convention*), Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1981 tentang Pengesahan New York Convention 1958 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.

Berdasarkan pendapat H.M. Thahir Azhari, bahwa kehadiran Arbitrase Islam di Indonesia merupakan suatu *conditio sine qua non*. Seperti halnya kehadiran Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) di bawah koordinasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara yuridis formal dilihat dari status hukum yang berlaku di Indonesia memiliki landasan hukum yang kokoh. Demikian juga pendapat H. Hartono Mardjono, S.H. sebagai Ketua Dewan Pengurus Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), Menegaskan bahwa: kehadiran "lembaga permanen" Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata di antara pihak-pihak yang bersangkutan, di samping memang merupakan suatu kebutuhan nyata, juga memiliki dasar-dasar hukum yang kuat berdasarkan hukum positif yang berlaku.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dalam tata hukum Indonesia mempunyai landasan hukum yang sangat kuat. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sebagai lembaga Arbitrase Islam dengan status badan hukum Yayasan diberi atau mempunyai kewenangan dalam upaya menyelesaikan sengketa bisnis para pihak sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). Berdasarkan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan dibolehkan melalui lembaga Arbitrase. Hal demikian telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penutup

Arbitrase yang berarti kekuasaan berfungsi untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *Tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata kerja *hakkama*. Secara etimologis, kata itu berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Keberadaan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) mempunyai sandaran yuridis baik dari hukum positif maupun hukum lisan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 khususnya penjelasan pasal 3 ayat (1) juga dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Sedangkan menurut Alquran atau Hadis juga mendapat dasar mengenai Arbitrase tersebut. Sebaiknya dalam kontrak bisnis bank-bank syariah memuat mengenai klausula Arbitrase menurut ketentuan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) sehingga memudahkan proses penyelesaian sengketa bila terjadi kelak.

Sisi politik hukum Islam yang terefleksi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase adalah adanya alternatif instrumen penyelesaian sengketa sehingga hal ini meringankan beban dari pengadilan. Adapun arbitrase sendiri adalah sebuah solusi yang sudah pernah terjadi pada zaman khalifah Ali bin Abi Thalib ra, sehingga dapat dikatakan bahwa diundangkannya regulasi arbitrase ini merupakan sebuah langkah solutif untuk mengurangi menumpuknya beban sengketa yang diajukan kepada pengadilan sekaligus menghidupkan *atsar* sahabat yang menjadi suatu bentuk perwujudan dari sisi-sisi solutif dari agama Islam.

Pustaka Acuan

Fuady, Munir, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Purwosutjipto, M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia—Buku Kedelapan: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Jakarta: PT. Djambatan.

Rahmat, Ngatino dan Rosyandi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Subekti, R., *Arbitrase Perdagangan*, Bandung: Binacipta, 1992.

Umar, M. Husseyn, dan A. Supriyani Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase di Indonesia*, Jakarta: Komponen Hukum ekonomi ELIPS Project, 1995).

Usman, Rachmadi, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

UU No. 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase.

Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011.